

PERUBAHAN POLA PENCAHARIAN NAFKAH DALAM KAITANNYA DENGAN PERSEPSI MASYARAKAT PEDALAMAN TERHADAP PENDIDIKAN

Suwarno

Universitas Palangkaraya
suwarno231@yahoo.co.id

Abstract: *Changes in subsistence patterns in relation to the perception of rural communities towards education. This study aims to describe the pattern of subsistence in rural communities before and after roads and bridges built, and a shift in the perception of rural communities towards education before and after the construction of infrastructure. The phenomenological perspective qualitative research was conducted on Bakumpai people in Tumbang Samba Central Kalimantan. Data collection techniques include in-depth interviews and participatory observation. The study found that after roads and bridges were built, the people did not anymore work in illegal logging, illegal gold mining, in Prau Kelotok, but they changed working in the field of travelling, transportation of goods, trade, agriculture and horticulture, freshwater (rivers) fisheries, and other services; there was a growing awareness in public perception that children need to be more intelligent and being educated in higher school level to seek knowledge in the hope of being useful person to the society, the nation, and the country.*

Keywords: Subsistence Patterns, Education, Rural Community

Abstrak: **Perubahan pola pencaharian nafkah dalam kaitannya dengan persepsi masyarakat pedalaman terhadap pendidikan.** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola pencaharian nafkah masyarakat pedalaman sebelum dan sesudah dibangun jalan raya dan jembatan, dan pergeseran persepsi masyarakat pedalaman terhadap pendidikan sebelum dan setelah adanya pembangunan infrastruktur. Penelitian kualitatif perspektif fenomenologi ini dilakukan pada kelompok masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba Kalimantan Tengah. Teknik pengambilan data meliputi pengamatan partisipasi dan wawancara mendalam. Penelitian menemukan bahwa setelah infrastruktur jalan dan jembatan dibangun, masyarakat tidak lagi sebagai penebang kayu illegal, bekerja di penambangan emas illegal, bekerja di prau kelotok, tetapi mereka beralih bekerja di bidang travel, angkutan barang, bekerja pada sektor perdagangan, pertanian dan perkebunan, perikanan air tawar (sungai), dan jasa lainnya; persepsi masyarakat sudah tumbuh kesadaran bahwa anak harus lebih cerdas, lebih tinggi bersekolah guna mencari ilmu dengan harapan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kata Kunci: Pola Pencaharian Nafkah, Pendidikan, Masyarakat Pedalaman

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan, pembangunan berwawasan kelestarian lingkungan, pembangunan rakyat semesta, dan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan merupakan implementasi pemerintah dalam

mengemban tanggung jawabnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan ekonomi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengisi kemerdekaan.

Pembangunan merupakan suatu konsep yang memuat multi-maknawi dan

berdimensi kompleks serta memuat substansi yang sangat mendalam, serta sarat dengan interpretasi optimistik dan pesimistik. Setidaknya, pembangunan memuat dimensi moral, yaitu terjadinya suatu proses transformasi nilai materiil maupun immateriil dalam masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik. Ini berarti pembangunan menimbulkan berbagai perubahan, atau pergeseran, baik secara fisik, maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, perubahan menuju situasi yang lebih baik merupakan konsekuensi logis dari pembangunan yang ditandai dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Pembangunan merupakan salah satu cerminan suatu masyarakat yang ingin berubah. Kebijakan pembangunan berdampak pada perubahan perilaku dan sikap masyarakat. Pembangunan pada satu sisi tidak hanya menimbulkan perubahan dalam masyarakat, tetapi juga membangkitkan berbagai potensi daerah maupun potensi masyarakat (*capacity*) untuk bisa berkembang lebih besar, lebih mandiri dalam rangka memajukan, mensejahterakan masyarakatnya. Di sisi yang lain, pembangunan juga berarti menumbuhkembangkan nilai-nilai yang positif yang ada di masyarakat yang pada akhirnya pencapaian kesejahteraan menjadi lebih cepat.

Pembangunan juga memiliki nilai-nilai yang sangat penting, yang perlu diperhatikan. Nilai-nilai yang sangat penting tersebut adalah: 1) suatu pemenuhan kebutuhan untuk bisa hidup, 2) harga diri, dan 3) kebebasan. Ketiga nilai tersebut

merupakan motor penggerak tingkah laku manusia dalam membangun (Todaro, 1983).

Membicarakan nilai-nilai yang terkandung di dalam manusia, tidak bisa lepas dari hak asasi manusia khususnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Terkait dengan hal tersebut, terdapat tujuh hak dasar manusia yang dihormati dan dikembangkan, yaitu: (1) hak atas pangan, (2) hak atas kepemilikan, (3) hak atas pekerjaan, (4) hak atas pendidikan, (5) hak atas kesehatan, (6) hak atas taraf kehidupan yang layak, dan (7) hak untuk menikmati dan mengembangkan ilmu pengetahuan (Kovenan Internasional, 1996 dalam Baswir, dkk, 2003: XV).

Pemenuhan dan pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tersebut, sangat tergantung dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sebagai pengemban pencapaian tujuan pembangunan nasional, yang dalam pelaksanaannya sangat dibantu pemerintahan daerah. Ini dapat diartikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk kepentingan pemerintah saja, namun lebih utamanya adalah dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia, meningkatkan kemampuan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja, dengan harapan tingkat kesejahteraan akan meningkat.

Masyarakat merupakan komponen penting yang menikmati dan menerima dampak pembangunan itu sendiri. Dalam perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan dan mengakomodasi masukan-masukan dari masyarakat. Hal ini

merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berasal dari bawah (*bottom-up*) untuk menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat.

Dalam kondisi yang sangat mendasar dan berdampak sangat luas dalam hal pengembangan berikutnya, seperti pembukaan daerah terisolir, mengingat pembangunan tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi daerah tersebut. Kondisi demikian yang terjadi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai kabupaten pemekaran yang sebagian besar wilayahnya masih terisolir, maka mempunyai tugas untuk membuka daerah-daerah yang masih terisolir tersebut, dengan cara pembangunan infrastruktur, sehingga berbagai arus barang dan jasa (ekonomi, sosial, politik dan budaya) akan berkembang di daerah tersebut. Dengan demikian, berbagai potensi daerah dapat digali, dan kembangkan secara maksimal, baik itu potensi alam maupun potensi ekonomi, sosial, dan budaya.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimanakah pola pencaharian nafkah masyarakat pedalaman sebelum dan sesudah dibangun jalan raya dan jembatan? dan bagaimanakah persepsi masyarakat pedalaman terhadap pendidikan setelah adanya pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan bangunan sekolah?

Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi perubahan nilai, norma, pola sikap, dan pranata sosial. Sementara itu ahli lain mendefinisikan perubahan sosial sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta setiap modifikasi pola antar

hubungan yang mapan dan standar perilaku. Definisi lain diungkapkan oleh Ritzer yang mengatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu (Sztompka, 2005: 5).

Berdasarkan definisi tentang perubahan sosial tersebut di atas, jelas bahwa perubahan sosial itu adalah fenomena yang menembus ke berbagai tingkat kehidupan sosial atau perubahan terhadap seluruh aspek kehidupan sosial. Adakalanya perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas ruang lingkungannya, tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai keseluruhan tetap utuh, tidak terjadi perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di dalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Dalam sistem sosial sering terlihat perubahan berangsur-angsur dari ciri-cirinya secara keseluruhan dan mengarah kepada ciri-ciri kuantitatif dan kualitatif baru (Sztompka, 2005: 5).

Perubahan sosial dan institusional yang terjadi tidak berarti bahwa perubahan serupa akan terjadi juga di dalam komunitas, begitu pula perubahan sikap tidak berarti bahwa di sana telah terjadi perubahan di dalam institusi sosial. Perubahan sosial adalah normal dan berkelanjutan, tetapi menurut arah yang berbeda di berbagai tingkat kehidupan sosial dengan berbagai tingkat kecepatan (Lauer, 2003).

Pemahaman mengenai perubahan adalah prasyarat untuk memahami struktur. Orang yang memandang masyarakat sebagai sistem yang berada dalam keseimbangan dan yang mencoba menganalisis aspek

struktural dari sistem atau masyarakat itu akan mengakui bahwa keseimbangan (*equilibrium*) hanya dapat dipertahankan melalui perubahan tertentu di dalam sistem tersebut. Perubahan ini terjadi sebagai tanggapan atas kekuatan eksternal yang menimpa sistem itu. Karena itu, baik perubahan internal maupun eksternal, diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan, dan tidak ada alasan logisnya mengapa pemahaman mengenai struktur diprioritaskan atas pemahaman mengenai perubahan. melekat di dalam sifat kehidupan sosial

Lebih realistis dan bermanfaat melihat perubahan sebagai melekat di dalam sifat sesuatu, termasuk melekat di dalam kehidupan sosial (Lauer, 2003). Perubahan ada di mana-mana, mulai dari masyarakat primitif, masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya sampai pada masyarakat modern di Amerika Serikat (Lauer, 2003: 10).

Pembangunan merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial ke arah pola hidup yang modern dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat.

1. Faktor internal, adalah faktor terjadinya perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, meliputi: (a) perubahan orientasi hidup dan pola perilaku manusia. Faktor kunci seorang individu mampu merubah orientasi hidup dan pola perilaku inovatif atau selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik adalah tingginya kualitas sumberdaya manusia; (b) bertambahnya

jumlah penduduk, semakin besar jumlah penduduk akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Namun, jumlah penduduk yang besar dengan tingkat sumberdaya manusia yang rendah akan meningkatkan problema sosial yang kompleks, meningkatkan jumlah pengangguran, meningkatkan beban pemerintah dalam memberikan layanan sosial, dan akan meningkatkan kemiskinan; dan (c) munculnya konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Pada umumnya salah satu penyebab mudahnya terjadi konflik antar kelompok di masyarakat karena rendahnya kualitas wawasan kehidupan individu dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan rendahnya kualitas pengetahuan tentang beragam alternatif pilihan sosial budaya dalam kehidupan berbangsa.

2. Faktor eksternal, meliputi pertumbuhan penduduk, pembangunan, kontak sosial dengan masyarakat atau negara lain, terjadinya peperangan antar suku, negara (karena konflik) dan terjadinya bencana alam (Soekanto, 1992), Kemampuan warga masyarakat untuk berkompetisi dan menjalin kontak sosial budaya dengan masyarakat luar juga sangat ditentukan oleh kualitas pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan warga masyarakatnya. Semakin rendah sumberdaya masyarakatnya akan semakin sulit berkompetisi dengan masyarakat lain dan akan menjadi masyarakat terjajah.

Sosiolog Elex inkeles dan David Smith dalam mengatakan bahwa faktor kunci

terjadi perubahan sosial menuju ke arah kehidupan modern (pembangunan) adalah sikap mental manusia yang bersifat modern. Sedangkan ciri sikap mental manusia modern adalah: (a) cinta dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) sikap mental yang terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru; (c) sikap mental yang berorientasi ke masa sekarang dan akan datang; (d) punya kesanggupan untuk merencanakan dengan baik setiap akan melakukan suatu agenda kegiatan hidup; (e) sikap mental menghargai karya orang lain atau mempunyai sikap mental tolerir; (f) sikap mental selalu tidak puas terhadap karya budaya yang telah ada; (g) percaya bahwa manusia bisa menguasai alam dan bukan sebaliknya; dan (h) menjunjung tinggi nilai atau prinsip hidup, bahwa upaya yang di dapat sesuai dengan karyanya (Budiman, 1995).

Terdapat dua pendekatan dalam membahas teknologi sebagai faktor utama pendorong terjadinya perubahan sosial. Pendekatan pertama dalam upaya mereka menerangkan berbagai perubahan dalam kehidupan keluarga. Terdapat 8 jenis perubahan utama dalam keluarga, meliputi: tekanan pada aspek percintaan, perkawinan, kesadaran pada keluarga yang kecil, istri yang juga bekerja, pengaruh, peran dan kekuasaan orang tua yang semakin berkurang, perhatian terhadap anak yang semakin besar, perceraian yang semakin meningkat, dan fungsi keluarga yang menurun.

Berbagai pandangan tentang perubahan sosial, pandangan pertama mengatakan telah terjadi perubahan sosial jika sudah terjadi perubahan di semua bidang

kehidupan yang meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian sosiologi. Cara pandang demikian mengindikasikan bahwa perubahan sosial mengandung perubahan tiga dimensi, yaitu perubahan struktural, kultural, dan interaksional, dengan kata lain perubahan sosial merupakan perubahan dalam sistem sosial. Cara pandang demikian banyak dikritik karena terlalu luas dan sulit menganalisis dengan baik dan mendalam. Oleh karena itu, muncul cara pandang kedua yang dikemukakan oleh Davis bahwa:

"Perubahan sosial jelas batasnya agar mudah dalam melakukan analisisnya. Karena itu, analisis tentang fenomena perubahan sosial hanya dilakukan dalam kaitannya dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi sosial. Ada juga sosiolog yang lebih tertarik menganalisis fenomena perubahan sosial sejauh fenomena itu bisa diamati (diukur), seperti mobilitas sosial (tenaga kerja), komposisi penduduk, perubahan sistem pemerintahan. Konsep lain mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan penting dalam struktur sosial, pola-pola perilaku, dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural." (Narwoko dan Suyanto, 2004: 342).

Perbedaan cara pemahaman konsep perubahan sosial di atas sudah tentu akan berpengaruh pada kajian-kajian substansi perubahan sosial, terutama yang bersangkutan paut dengan perbedaan pada masalah-masalah: (1) tingkat perubahan (mikro–makro); (2) kesinambungan dan arah gerak perubahan dari mikro ke makro atau sebaliknya; (3) penyebab perubahan sosial (internal dan eksternal, berupa materi atau

ide); dan (4) persoalan langsung-tidaknyanya perubahan sosial.

Berkaitan dengan teori persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengertian persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwodarminto, 1988) adalah pertama diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan yang masih perlu diteliti, dan kedua proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindra. Adapun menurut Kamus Sosiologi diartikan sebagai suatu sensasi dan interpretasi. Sensasi adalah adanya suatu kesadaran yang tidak dapat diperkirakan atau ditafsirkan yang timbul dari stimulasi. Dari definisi tersebut, dapat ditangkap bahwa orang memberikan persepsi terhadap sesuatu atas dasar kesadaran total, kesadaran yang paling dalam yang timbul karena suatu rangsangan atau sesuatu sebab.

Persepsi memegang peranan penting dalam melakukan sesuatu dan berpengaruh dalam pola pikir dan perilaku serta menentukan pilihan tentang apa yang dilakukan. Penilaian terhadap sesuatu sangat dipengaruhi oleh persepsi yang diberikan terhadap sesuatu tersebut. Sesuatu tersebut bisa ditanggapi negatif atau positif sangat tergantung pada persepsi yang diberikan.

Kebenaran suatu persepsi hanya berdasarkan pancaindra, yaitu penglihatan/pengamatan, pendengaran, perabaan, penciuman dan rasa. Segenap panca-indra tersebut dikerahkan guna menangkap sesuatu yang baru, dan setelah melalui perenungan, pengendapan, berdasarkan manfaat, peran dan fungsinya baru

seseorang memutuskan dalam kaitannya dengan pemberian persepsi. Dalam hal pemberian persepsi terhadap sesuatu, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat besar, terutama dalam hal sosialisasi atau pemberian penjelasan kepada masyarakat.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif perspektif fenomenologi. Penelitian dilakukan pada kelompok masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Agustus 2008. Subjek penelitian meliputi masyarakat aliran sungai yang berpindah ke pinggir jalan raya. Teknik pengambilan data meliputi pengamatan partisipasi dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif sebagaimana dikembangkan oleh Moleong, (2002) yang meliputi koleksi data, penyajian data, klasifikasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Bakumpai bertempat tinggal di desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Samba Danum dan Samba Kahayan. Ke empat desa tersebut berada di sekitar pertemuan sungai, yaitu sungai Samba dan sungai Katingan dan daerah tersebut dikenal dengan nama Tumbang Samba. Tumbang Samba merupakan ibu kota Kecamatan Katingan Tengah. *Tumbang* dalam bahasa Dayak berarti pertemuan atau muara sungai, maka Tumbang Samba berarti muara

sungai Samba atau pertemuan sungai Samba. Sungai Samba merupakan anak sungai Katingan, sungai tersebut tergolong sungai hujan, yaitu sungai yang mendapat suplai airnya dari mata air dan hujan.

Secara administratif Tumbang Samba merupakan wilayah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan sendiri merupakan kabupaten pemekaran. Sungai Katingan merupakan jalur transportasi perdagangan utama sebelum ada transportasi darat. Mengingat jalan darat yang menghubungkan ibu kota kabupaten Katingan (Kasongan) masih merupakan jalan tanah, sehingga pada musim hujan jarang kendaraan roda empat yang melintasi jalan tersebut, dan transportasi air (sungai Katingan) merupakan satu-satunya alternatif sarana transportasi untuk membawa berbagai macam barang dagangan, yaitu menggunakan kapal sungai (*bis air*, *klotok* dan lain sebagainya).

Tumbang Samba merupakan pintu gerbang untuk menuju daerah pedalaman, yang pada umumnya hanya dapat dijangkau melalui sungai, dan itu pun pada musim hujan. Oleh karena itu, daerah Tumbang Samba merupakan kota terakhir yang dapat dijangkau oleh transportasi darat (itu pun masih jalan pengerasan atau jalan tanah). Daerah Tumbang Samba menjadi pintu gerbang, sebab jalan darat yang menghubungkan dengan ibu kota provinsi dan kabupaten berakhir di Tumbang Samba.

Jarak dengan ibu kota provinsi atau kota terdekat, belum bisa diketahui dengan pasti, masyarakat setempat bisa menggunakan ukuran waktu (jam). Jadi daerah penelitian dapat ditempuh melalui jalan darat dengan

lama waktu sekitar 4 jam dari kota Kasongan (kota terdekat) dan sekitar 5,5 jam dari kota Palangka Raya (ibu kota provinsi). Jika melalui sungai sekitar 5 jam dari Kasongan dan 6,5 jam dari Palangka Raya. Palangka Raya sampai Kasongan dapat ditempuh melalui jalan darat dengan kondisi jalan yang cukup baik, dan dari Kasongan sampai dengan Tumbang Samba dapat ditempuh melalui darat dengan kondisi jalan yang tidak baik (jalan pengerasan/tanah, sehingga jika musim hujan sangat berat untuk dilalui kendaraan), jika ditempuh melalui sungai dari Kasongan ke Tumbang Samba dengan kendaraan *speed boat*, *klotok* bermesin, maupun *long boat*.

Klasifikasi wilayah administrasi desa-desa di Tumbang Samba tergolong desa swakarya, sementara desa-desa lain di kecamatan Katingan Tengah masih berstatus desa swadaya. Kondisi ini mencerminkan bahwa ke empat desa tersebut lebih maju dan lebih mandiri jika dibandingkan dengan desa lain di kecamatan Katingan Tengah.

Hal tersebut sebagai bukti nyata dari keberhasilan pembangunan dan kemampuan serta kemandirian masyarakat di Tumbang Samba. Lembaga pemerintah yang ada di Tumbang Samba meliputi satu kantor POLSEK, satu kantor kecamatan, empat kantor desa, satu kantor PUSKESMAS, satu kantor POS, sembilan masjid, sembilan belas surau/langgar (sebagian besar penduduk Tumbang Samba beragama Islam), satu gereja yang berada di desa Samba Danum. Setiap desa di Tumbang Samba memiliki lapangan sepak bola, lapangan bulutangkis, dan lapangan bola *volley*, dan hal tersebut masih

memungkinkan untuk terus bertambah seiring dengan kemajuan pembangunan.

Perubahan Pola pencaharian penduduk

Tumbang Samba terbayang kehidupan daerah di pedalaman namun penduduknya memiliki kehidupan ekonomi yang cukup mapan dengan mata pencaharian yang bervariasi, mulai dari sektor jasa, perdagangan, maupun pertanian atau perkebunan, dan sebagian kecil yang bekerja di sektor nelayan atau memelihara ikan di keramba.

Sebelum adanya kebijakan larangan *illegal logging* dan *illegal mining* diterapkan oleh pemerintah, masyarakat di Tumbang Samba merasakan hidup serba mudah (dalam hal mencari nafkah). Pada umumnya mereka bekerja di perikanan (HPH) dan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan sektor lain yang masih terkait dengan sektor kayu dan tambang yang mendukung, yaitu bidang perdagangan guna memenuhi kebutuhan dasar dari orang yang bekerja di kayu dan pertambangan tersebut. Di samping itu masyarakat juga bekerja di transportasi sungai. Saat itu, transportasi sungai berkembang dengan pesat dan sangat menjanjikan. Sebab, kondisi transportasi sungai ramai karena transportasi darat belum ada.

Terdapat beberapa hal pada masa itu yang dapat dijadikan indikator, mengapa masyarakat Bakumpai khususnya dan masyarakat Tumbang Samba pada umumnya sedikit sekali yang bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan oleh mudahnya mencari nafkah, dan umumnya masyarakat bekerja yang langsung

memperoleh upah, seperti bekerja mengantar tamu yang datang dari kota untuk meninjau perusahaan kayu, atau survey tambang, mengangkut barang dan semuanya diangkut menggunakan kapal barang, transportasi sungai (*speed boat, klotok, maupun kapal barang*) masih ramai penumpang, penggergajian kayu, dan perdagangan kayu masih mudah (tidak banyak razia), perdagangan di pasar juga masih banyak pembeli, jumlah penduduk di Tumbang Samba jauh lebih banyak dari sekarang, arena mereka adalah para pekerja kayu, dan jika hari minggu mereka ke Tumbang Samba untuk berbelanja. Fenomena seperti itulah yang mendorong masyarakat untuk menelantarkan atau tidak memandang sebelah mata untuk bekerja sebagai petani. Oleh karena itu pertanian, perkebunan karet hanya dianggap sebagai pekerjaan sambilan atau pengisi waktu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ulu, sebagai berikut.

”Dulu rumah kami di tepi sungai Katingan (di bawah situ, sambil menunjuk), sekarang di tepi jalan raya (masih jalan tanah). Kalau bekerja mencari puyak (pasir kuarsa warna merah) atau menebang kayu, mencari hasil hutan, maupun menambang, itu cepat menjadi uang, tetapi kalau bertani kami menunggu, itu yang tidak bisa. Oleh karena itu, kami membuka lahan, langsung kami tanami padi, ketela pohon dan karet, habis itu kami tinggal kerja lain yang bisa cepat menghasilkan. Orang mudah ndak mau kerja yang seperti itu.”

Sebagai daerah yang baru terbuka dari keterisolation, dan daerah yang baru memiliki jalan darat, maka daerah Tumbang Samba

bangkit dari segala ketertinggalan, termasuk ketertinggalan pada aspek pertanian. Menyadari potensi alam yang melimpah yang selama ini kurang diperhatikan, maka sejak adanya kebijakan pemerintah terhadap *illegal logging* dan *illegal mining*, yang melumpuhkan perekonomian di pedesaan masyarakat Tumbang Samba dan sekitarnya, maka sektor pertanian/perkebunan dan perikanan mulai menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Masyarakat mulai membuka lahan, dan menanaminya dengan tanaman padi lahan kering, ketela pohon, jagung dan tanaman karet. Setelah padi, jagung dan ketela pohon panen, petani tinggal merawat tanaman karet (sebagai tabungan/kebun karet), sehingga semakin lama kebun-kebun karet petani semakin bertambah luas. Kemudian para petani membentuk kelompok-kelompok petani karet. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang tokoh petani yang disegani:

"Saya ini bekas pengusaha kayu, dulu kami sukses, Bapak bisa lihat sisa-sisa perusahaan saya masih ada, namun sejak kayu sulit didapat, dan usaha tambang dilarang pemerintah, masyarakat yang bekerja di situ kebingungan mencari kerja lain, pasar yang biasanya ramai pembeli menjadi berkurang, jasa transportasi menjadi sepi, karena banyak orang Jawa yang kerja di perusahaan kayu yang pulang ke Jawa, toko-toko di perusahaan kayu tutup, dan pedagang sayuran tidak lagi pernah mengantar sayurannya ke perusahaan-perusahaan kayu dan tambang. Akhirnya, saya berkebun saja, menanam pisang, rambutan, jeruk, ketela pohon dan sayuran dengan dibantu beberapa pekerja saya, hasilnya lumayan. Pembentukan

kelompok-kelompok tani untuk petani karet sangat bagus, karet sekarang ini harganya bagus."

Selama ini, sistem pertanian pada masyarakat Tumbang Samba pada umumnya dan masyarakat Bakumpai pada khususnya secara teknologi masih sangat sederhana. Kesederhanaan tersebut tampak pada peralatan pertanian dan pengelolaan pertanian. Peralatan pertanian yang sering digunakan untuk pekerjaan pertanian antara lain *tugal* (alat untuk menanam padi), dan *ani-ani* (alat untuk memanen padi), *mandau* (alat untuk menebas semak belukar). Sementara untuk menanam padi di sawah juga belum menggunakan cangkul atau dibajak, melainkan rumput pada lahan basah (sawah) tersebut, diinjak-injak dan dikubur di dalam lumpur.

Tatacara menanam pun sangat sederhana, karena: (1) dilakukan penebasan semak belukar pada lahan yang hendak ditanami; (2) semak belukar yang sudah ditebas atau ditebang dikumpulkan di suatu tempat kemudian dibiarkan sekitar 2 – 3 hari, kemudian dibakar; (3) dilakukan penjagaan pada saat pembakaran agar api tidak menjalar ke lahan orang lain, atau membakar hutan; (4) dilakukan pematitan sebagai batas lahan pertanian dengan lahan orang lain; (5) lahan dibiarkan untuk sementara menunggu hujan tiba; (6) jika hujan sudah mulai turun, mulai dilakukan penanaman dengan menggunakan tugal jika menanam padi atau jagung; (7) tanaman yang ditanam biasanya jagung, padi, ketela pohon, dan karet. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Pak Subandi, dan Pak Nursidi Hamdi, yang menuturkan:

”Bertani di sini sangat mudah untuk dilakukan, tata urutan pengelolaan pertanian dimulai dari menebas semak belukar, dibiarkan kering, kemudian dikumpulkan dan dibakar (pada saat membakar tersebut dijaga oleh para pemilik lahan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebakaran lahan milik orang lain), Pekerjaan pembakaran semak belukar tersebut dilakukan pada saat menghadapi musim hujan yaitu sekitar bulan Agustus atau September. Setelah selesai pembakaran semak belukar, pekerjaan berikutnya adalah membersihkan ranting-ranting yang tidak habis terbakar, setelah itu lahan dibiarkan sambil menunggu hujan Setelah hujan turun, petani mulai menanam lahan mereka masing-masing, yang biasa dikenal dengan *menugal*. Kemudian tanaman pertanian dibiarkan tumbuh sampai pada masanya panen.”

Pengerjaan lahan sebagaimana dijelaskan di atas, bisa dilakukan secara bersama-sama (bergotong royong) dengan petani lain secara bergantian, yang dikenal dengan *handep*, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Nursidi Hamdi, yang menuturkan:

”*Handep* itu adalah upaya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama dan bergantian antar anggota kelompok yang bekerja sama tersebut. *Handep* juga bisa dilakukan pada acara pernikahan, misalnya saling membantu berbenah rumah atau bersih-bersih, dan pada tanggal pelaksanaan perkawinan, masyarakat saling menyumbang (memberikan barang atau benda-benda berharga sesuai dengan kemampuannya), juga bisa diterapkan pada

saat orang mendirikan rumah, yaitu tepatnya pada saat mendirikan kerangka kayu rumah, selebihnya dengan sistem kerja (pekerja diupah).”

Tanaman pertanian pada umumnya adalah tanaman yang berumur pendek (sekitar 3 bulan), misalnya padi, berbagai sayuran (kacang panjang, mentimun, bayam, sawi dan jagung). Sangat sedikit luas lahan pertanian (sawah) yang diusahakan oleh masyarakat Bakumpai. Padahal daerah Tumbang Samba sangat potensial untuk itu. Tanaman perkebunan yang terdapat di Tumbang Samba adalah tanaman karet, dan itu pun juga masih dikelola secara sederhana. Getah karet (sebagai hasil sadapan) dijual getahnya dalam bentuk latex (pengelolaan latex masih sangat sederhana).

Desa tersebut merupakan desa yang paling sedikit memanfaatkan lahan desa untuk lahan sawah. Samba Kahayan luas desa 2000 Ha, yang terdiri dari, sawah 23,55%, perkebunan 7%, bangunan dan pekarangan 3,2% dan hutan 46,25 %, sisanya adalah luas lain-lain. Desa tersebut merupakan desa di daerah penelitian yang paling luas lahan sawahnya. Kalau diperhatikan tabel 3 tersebut, maka masyarakat masih belum memaksimalkan pemanfaatan lahan untuk pertanian. Ini berarti masyarakat masih belum melihat pertanian sebagai sosial budaya yang dapat memberikan kesejahteraan, atau masih terdapat sosial budaya alternatif lain yang dapat memberikan penghasilan lebih. Itu pun pengelolaan lahan pertanian masih sangat sederhana (minim sentuhan teknologi dan pengetahuan tentang bercocok tanam) baik itu tanaman pertanian

maupun perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar lahan desa berupa hutan sekunder dan lain-lain. Tanaman pertanian yang ditanam antara lain padi, jagung, kacang-kacangan, mentimun, dan umbi-umbian. Adapun tanaman perkebunan adalah tanaman karet dan tanaman perkebunan dianggap sebagai tabungan.

Aktivitas masyarakat Bakumpai untuk menangkap ikan terjadi pada musim kemarau, di sela-sela tanaman pertanian mereka belum panen, karena pada musim hujan air sungai meluap. Alat menangkap ikan yang biasa digunakan antara lain *renggek*, *takalak*, dan *buwu*, dan hasilnya dikonsumsi sendiri, jika ada sisa, dijual ke pasar. Biasanya jika mendapatkan ikan sedikit (tidak cukup untuk dijual saat itu), maka ikan-ikan tersebut dimasukkan di keramba kecil, setelah beberapa hari (setelah terkumpul) baru dijual ke pasar.

Renggek dan *melunta* banyak dilakukan di danau atau di sungai pada air yang tenang. *Renggek* di pasang di tepi-tepi danau atau sungai, jika memasang pagi, pada sore hari diambil dan jika memasangnya sore, pagi hari besoknya diambil. Mereka *melunta* menggunakan *jukung* di musim kemarau. Sebagaimana dituturkan oleh Pak Ebeng yang menuturkan:

“Saya bekerja serabutan, kalau dulu saya kerja di kayu, dan juga melayani carteran kelotok di perusahaan. Sekarang karena kayu gak boleh, maka saya kerja menyeberangkan orang-orang dari Samba Katung, ataupun Bakumpai ke Samba Danum, maupun Samba Kahayan. Jika musim kemarau, karena air surut, maka saya sering memasang *renggek* ataupun *melunta*

ke danau Mare. Hasilnya lumayan, jika tidak habis terjual dalam keadaan ikan segar atau basah, maka ikan-ikan tersebut dibersihkan, lalu dijemur untuk dibuat ikan kering.”

Budidaya melalui sistem keramba (dengan jaring maupun dengan kayu) yang banyak terdapat di danau Mare. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Mang Ketek (salah seorang pemilik keramba dan depot di taman wisata Danau Mare):

“Saya memelihara ikan dalam keramba di danau Mare ini sudah cukup lama, sekitar 8 tahunan. Ikan yang saya pelihara adalah ikan mas, nila, patin, dan bawal sungai. Ikan-ikan tersebut saya jual ke pasar, minat orang-orang di sini terhadap ikan cukup tinggi. Hasil menjual ikan tersebut bisa untuk menguliahkan 2 anak saya dan duaduanya sekarang sudah sarjana. Untuk membuat keramba, di sini tidak ada masalah, karena di sini banyak persediaan kayu dan harganya murah, bahkan saya punya depot di danau Mare yang siap melayani para wisatawan.”

Daerah Tumbang Samba mempunyai potensi perikanan sungai (darat) yang besar, mengingat sepertiga wilayah Tumbang Samba merupakan daerah air (sungai dan danau). Memelihara ikan dengan sistem keramba sebagai usaha alternatif belum dilakukan secara maksimal. Masyarakat masih banyak yang hanya mengambil ikan dari sungai maupun danau. Untuk diketahui bahwa di desa Samba Katung terdapat danau Mare yang sangat potensial untuk dikembangkan usaha pariwisata dan perikanan, sebagaimana di Pulau Jawa (di daerah waduk) pada umumnya. Mengingat, jika hanya mengambil ikan saja tanpa

melakukan pembudidayaan, semakin lama ketersediaan ikan akan habis.

Dalam menghadapi perubahan fenomena, yang terjadi karena pembangunan infrastruktur, *illegal logging* dan *illegal mining*, maka tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam suatu rapat di kantor kecamatan, mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk secepatnya membangun sektor pertanian, terutama berbagai bantuan baik itu berupa bantuan fisik (peralatan bercocok tanam), bibit unggul maupun bantuan yang bersifat ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh H. Hasbi dan H. Ilyas:

”Dalam menghadapi perubahan fenomena sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur, *illegal logging*, dan *illegal mining* ini, kami sudah menyampaikan ke pemerintah tentang berbagai bantuan untuk sektor pertanian, perkebunan, jasa dan perikanan. Untuk itu, agar pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk sektor jasa transportasi darat, berbagai bantuan, baik itu fisik, maupun non-fisik untuk bidang pertanian dan perkebunan, serta perikanan.”

Persepsi terhadap Pendidikan

Salah satu faktor penting dalam ukuran keberhasilan pembangunan adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang siap menjadi tenaga penggerak, dan pelopor pembangunan. Pembangunan yang berkesinambungan yang dilaksanakan pemerintah bertujuan meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara merata. Demikian pula dengan kesempatan untuk

memperoleh pendidikan dan pengajaran merupakan pencerminan dari kemerdekaan suatu bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan seiring dan sejalan dengan ketersediaan fasilitas berbagai pendidikan: perpustakaan, sarana laboratorium, sarana praktikum, sarana komputer, sarana laboratorium, berbagai buku penunjang, guru yang berkualitas, sistem penerimaan siswa baru yang benar-benar objektif, dan sistem pendidikan yang baik.

Seiring dengan perihal tersebut di atas, maka di Tumbang Samba sampai dewasa ini sudah lebih dari cukup tersedia lembaga pendidikan formal, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pendidikan keagamaan mulai dari Ibtida'iyah sampai dengan Aliyah (setingkat SMA), dan secara rinci lembaga pendidikan formal tersebut berada di masing-masing desa yang antara lain dapat dijelaskan berikut ini, di desa Samba Danum terdapat 4 sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 4 Sekolah Dasar Negeri, satu Sekolah Dasar (SD) swasta, satu SMP Negeri, dua SMP swasta, satu SMA Negeri dan dua SMA swasta. Satu Taman Kanak-Kanak (TK), satu Sekolah Dasar Negeri, dan satu SMP Negeri, serta satu SMA swasta yang berada di desa Samba Bakumpai. Dua TK dan dua SD Negeri serta satu SMP Negeri yang berada di desa Samba Katung, serta satu Taman Kanak-Kanak dan 3 Sekolah Dasar Negeri yang berada di desa Samba Kahayan.

Sarana prasarana pendidikan ditingkatkan terus demikian juga dengan tenaga pengajar, sehingga secara perlahan tapi pasti diharapkan terjadi peningkatan

kualitas baik pendidikan maupun daya dukung sarana pendidikan. Peningkatan sarana pendidikan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di pemerintahan Kabupaten Katingan dan setia tahun ada peningkatan sarana fisik sekolah melalui pembangunan gedung baru seperti pembangunan kelas baru, perpustakaan sekolah, gedung pertemuan dan perbaikan gedung yang sudah ada. Pengadaan tenaga pengajar disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing sekolah yang disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada dan anggaran yang tersedia.

Bagi orang tua siswa yang tidak mampu, padahal setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, maka pemerintah menyediakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan berbagai bea siswa. Di samping itu, pemerintah desa juga berusaha membantu mencarikan dana pendidikan melalui sumbangan sukarela yang berasal dari masyarakat di desa melalui daftar sumbangan yang diedarkan setiap bulan oleh panitia yang dibentuk oleh pemerintah desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Adapun besarnya sumbangan tidak dibatasi sesuai dengan kemampuan masyarakat. Hasil perolehan sumbangan tersebut disalurkan langsung ke sekolah sesuai dengan daftar yang sudah dimiliki oleh pemerintah desa yang diperoleh dari sekolah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pak Nursidi Hamdi sebagai berikut.

"Didorong oleh kesadaran pentingnya pendidikan bagi putra-putri kami, maka anak-anak yang tidak mampu tetap sekolah, dan untuk keperluan dana pendidikan kami

para orang tua melakukan penarikan sumbangan sukarela yang kami lakukan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, biasanya mereka memberikan sumbangan minimal seribu rupiah samai dengan sepuluhribu rupiah."

Maka tidak ada lagi anak yang masuk usia sekolah yang tidak sekolah, dan secara umum rata-rata pendidikan masyarakat Bakumpai berpendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga mereka rata-rata dapat berbahasa Indonesia dengan cukup lancar. Adapun mengenai motivasi dan keinginan orang tua untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi) sangat besar, namun disesuaikan dengan kemampuan anak dan juga kemampuan ekonomi orang tua. Jika sang anak mempunyai nilai bagus maka dikuliahkan, namun jika kurang bagus, orang tua mengajarnya untuk bekerja (berdagang atau berkebun/bertani). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pak Uluay dalam suatu wawancaranya yang antara lain sebagai berikut.

"Kalau ditanya soal keinginan untuk menyekolahkan ke perguruan tinggi, tentu ingin, namun untuk menuju ke arah itu, kami para orang tua melihat bakat anak. Seperti saya ini, saya lihat anak-anak saya tidak berbakat untuk sekolah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ya saya ajak untuk membantu saya berkebun/bertani karet saja dan serabutan jika ada kerjaan-kerjaan lain."

Jadi, para orang tua dari kelompok masyarakat di Tumbang Samba, dan khususnya masyarakat Bakumpai, sudah tumbuh kesadaran bahwa anak harus lebih

cerdas, lebih tinggi bersekolah guna mencari ilmu dengan harapan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kalaupun belum menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, itu semata-mata karena keterbatasan dana (faktor ekonomi) semata.

Pembahasan

Dulu, jalan darat yang menghubungkan Tumbang Samba ke kota Kasongan, dan kota-kota lain belum ada. Satu-satunya sarana transportasi yang ada adalah sarana transportasi sungai. Oleh karena itu, sarana transportasi yang berkembang adalah transportasi sungai, sehingga sungai sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Tumbang Samba pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Katingan pada umumnya. Karena masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba khususnya dan masyarakat kabupaten Katingan pada umumnya bertempat tinggal di sekitar sungai, sehingga kondisi sosial ekonomi, dan budaya masyarakat tersebut di atas tidak terlepas dari sungai.

Mengingat pada waktu dulu, sungai sebagai sumber kehidupan dan satu-satunya sarana transportasi, maka usaha jasa transportasi sungai sangat berkembang (*speed boat*, klotok dan tongkang atau bis air). *Speed boat* merupakan kendaraan penumpang yang paling cepat sehingga banyak tamu perusahaan kayu yang hilir mudik memanfaatkan *speed boat* tersebut sebagai kendaraan untuk menuju ke perusahaan atau keperluan-keperluan mereka. Klotok adalah perahu yang terbuat dari kayu, namun bermesin truk, sehingga

klotok tersebut biasanya digunakan untuk kendaraan angkutan barang namun juga bisa manusia, demikian juga dengan bis air, maupun tongkang. Mencari nafkah lebih mudah, karena aktivitas pengusaha kayu dan tambang yang banyak memanfaatkan jasa masyarakat sekitar perusahaan, tidak terkecuali masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba. Jasa angkutan kayu dari perusahaan kayu di hulu yang diangkut ke pelabuhan (hilir sungai) biasanya menggunakan jasa angkutan klotok (untuk menarik log tersebut).

Hal tersebut berdampak positif pada kondisi sosial ekonomi dan budaya pada masyarakat setempat, antara lain berkembangnya usaha perdagangan di tepi sungai (pertokoan, warung atau depot, pangkalan minyak atau bensin/solar, pelabuhan sungai), sehingga terasa mudah mencari nafkah pada saat itu (apapun yang dilakukan menjadi uang). Mengingat pada waktu itu, sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat, hampir semua aktivitas masyarakat terjadi di atas sungai, maka akhirnya hampir seluruh pikiran, sikap, tindakan, perilaku, budaya, motivasi kerja adalah berorientasi pada sungai.

Akibat semua itu, sektor pertanian/perkebunan kurang terurus atau terabaikan. Pertanian/perkebunan dan perikanan sungai bagi masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba merupakan usaha pengisi waktu luang atau sambilan, karena masyarakat tersebut lebih senang bekerja yang bisa langsung memperoleh penghasilan (uang), misalnya jasa transportasi sungai. Oleh karena itu sektor

pertanian/perkebunan dan perikanan tidak berkembang.

Fenomena setelah Pembangunan Infrastruktur, *Pertama*, jalan darat yang menghubungkan Tumbang Samba ke kota Kasongan, dan kota-kota lain sudah dapat dimanfaatkan, yang disertai dengan berbagai pembangunan lain seperti pembangunan komunikasi (telepon seluler). Transportasi darat (jalan raya) berkembang pesat, sehingga sungai sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Tumbang Samba pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Katingan pada umumnya secara perlahan tapi pasti mengalami pergeseran makna.

Kedua, larangan tentang *illegal logging dan illegal mining* berdampak negatif pada faktor ekonomi masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba (merontokan sendi-sendi ekonomi masyarakat) dan secara tidak langsung jasa transportasi sungai juga terkena imbasnya.

Ketiga, usaha jasa transportasi sungai mengalami mati suri, masyarakat banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan artinya mencari nafkah lebih sulit, masyarakat mengalami himpitan atau tekanan ekonomi keluarga, daya beli masyarakat menurun, pasar tradisional satu-satunya menjadi sepi, pengangguran bertambah. Sebagian besar karyawan perusahaan pulang ke Jawa, sehingga menambah sepi pasar.

Keempat, kondisi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba yang memiliki lahan kembali bekerja di sektor pertanian/perkebunan dan perikanan, jasa transportasi jalan raya, dan perdagangan, sehingga pertanian/perkebunan, perikanan

sungai tersebut di atas bukan lagi sebagai pekerjaan sambilan, melainkan menjadi pekerjaan pokok.

Kelima, kondisi ini berpengaruh pada pikiran, sikap, tindakan, perilaku, budaya, motivasi kerja tidak lagi berorientasi pada kehidupan di sungai melainkan pada kehidupan di daratan. Kondisi ini merupakan hal baru bagi masyarakat, sehingga masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba belum terbiasa, akibatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami berbagai penyesuaian atau adaptasi, dan masyarakat hidup dalam tekanan sosial ekonomi yang berat.

Tuntutan tekanan ekonomi keluarga mendesak setiap anggota keluarga untuk mencari pekerjaan. Bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama masyarakat Baumpai di Tumbang Samba memindahkan lokasi kerja, memindahkan tempat tinggal, menjual berbagai peralatan kerja yang bermediakan sungai (*jukung, jukung tempel, klotok, rangkan, speed boat, lanting*) dan kemudian mengadopsi berbagai teknologi dengan cara belajar mengendarai mobil, membeli mobil untuk travel, sepeda motor, membeli peralatan pertanian, bertani (berkebun karet), dan mengurus SIM (Surat Ijin Mengemudi), menguasai berbagai ketrampilan yang terkait dengan pekerjaan baru.

Pekerjaan yang baru dengan nilai-nilai baru menyebabkan masyarakat menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan lama dengan kebiasaan baru sesuai dengan nilai-nilai, atau kebiasaan yang ada pada pekerjaan yang baru tersebut, sehingga terjadi transisi nilai atau norma-norma dan

kebiasaan pada setiap individu sesuai dengan pekerjaan yang baru dimiliki

Masyarakat Bakumpai di Tumbang Samba mengalami perubahan nilai, norma (perilaku) yang dipengaruhi oleh pekerjaan yang dimiliki. Karena pekerjaan mereka pada umumnya di daratan (jasa transportasi darat dan pekerjaan lain yang masih terkait), perdagangan dan pekerjaan lain yang terkait, pertanian dan perkebunan, perikanan air tawar (sungai), dan jasa lain.

Perubahan pekerjaan, perubahan pola hidup, perkembangan teknologi, merupakan sesuatu yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya dan membawa masa depan bagi generasi berikutnya ke arah yang lebih sejahtera. Mengapa harus bertahan pada suatu pekerjaan, tata kehidupan, dan suatu pola kehidupan yang lama jika harus bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang jelas-jelas berdampak pada kehidupan sosial yang tidak lebih baik dan tidak harmonis. Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan jelas untuk suatu pembaharuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hutan merupakan penyanggah kestabilan lingkungan udara, air dan tata kehidupan alam. Jika hutan terus ditebang secara membabi buta, berarti merusak lingkungan, dan lingkungan yang rusak adalah bencana bagi manusia. Demikian juga dengan penambangan secara liar atau tanpa ijin dapat merusak lingkungan alam dan berarti bencana bagi manusia.

Berkaitan dengan persepsi masyarakat di Tumbang Samba dan khususnya masyarakat Bakumpai, saat ini sudah tumbuh kesadaran bahwa anak harus bersekolah agar lebih

cerdas, lebih tinggi tingkat pendidikannya, dengan bersekolah, mencari ilmu. Dengan bersekolah diharapkan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tanpa bersekolah, hanya akan menjadi buruh petani, kuli bangunan, sopir, dan pekerjaan kasar lainnya.

Saat ini, apabila ada masyarakat yang belum menyekolahkan anaknya ke SMA, SMK, atau perguruan tinggi, hal itu semata-mata disebabkan karena keterbatasan dana semata. Realitas yang ada di lokasi penelitian saat ini, sudah tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah, dan secara umum rata-rata pendidikan masyarakat Bakumpai berpendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kesimpulan

1. Masyarakat Baumpai di Tumbang Samba setelah infrastruktur jalan dan jematian dibangun, mereka memindahkan lokasi kerja, memindahkan tempat tinggal, menjual berbagai peralatan kerja yang bermediakan sungai (*jukung, jukung tempel, klotok, rangkan, speed boat, lanting*) dan kemudian mengadopsi berbagai teknologi dengan cara belajar mengendarai mobil, membeli mobil untuk travel, sepeda motor, membeli peralatan pertanian, bertani (berkebun karet), dan mengurus SIM (Surat Ijin Mengemudi), menguasai berbagai ketrampilan yang terkait dengan pekerjaan baru seperti usaha travel, angkutan barang. Selain itu mereka bekerja pada sektor perdagangan dan pekerjaan lain yang terkait, pertanian dan

perkebunan, perikanan air tawar (sungai), dan jasa lain.

2. Persepsi masyarakat di Tumbang Samba, dan khususnya masyarakat Bakumpai, sudah tumbuh kesadaran bahwa anak harus lebih cerdas, lebih tinggi bersekolah guna mencari ilmu dengan harapan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Walaupun belum menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, itu semata-mata karena keterbatasan dana (faktor ekonomi) semata. Saat ini, tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah, dan secara umum rata-rata pendidikan masyarakat Bakumpai berpendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Soekanto, Soerjono (1992) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Sztompka, Piotr (2005) *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada

Todaro, Michael P. (1983) *Ekonomi Pembangunan di Dunia ketiga*. (Diterjemahkan oleh Mursid). Jakarta: Penerbit Balai Aksara

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrison dkk. (2003). *Pembangunan Tanpa Perasaan. Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: ELSAM
- Budiman, A. (1995) *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lauer, H. Robert. (2003) *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Poerwadarminta, W. J. S. (1988). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ritzer, George. (1987). *Sociological Theory*, Second edition. New York: Knopf